

Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Dan Pendapatan Asli Daerah Lain Yang Sah Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Manado (2008-2014)

Avriano R. Tenda, Vekie A. Rimate, Daisy S.M Engka
yanotenda.yt@gmail.com

ABSTRACT

Otonomi daerah sejatinya merupakan pelimpahan wewenang dari sentralisasi ke desentralisasi, artinya kewenangan dari pusat sudah dilimpahkan ke daerah begitu juga dengan pengelolaan anggaran rumah tangganya sendiri.

Kemandirian ekonomi sebuah daerah juga dinilai dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD terbesar datang dari pajak, retribusi dan PAD lain yang sah. Dalam penelitian ini digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui seberapa besar sumber-sumber PAD yakni pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan PAD lain yang sah mempengaruhi belanja pembangunan / belanja langsung kota Manado.

Dalam pengujian didapatkan, angka R square sebesar 95,9 yang artinya tingkat pengaruh ketiga variable independen yang tergabung dalam PAD mempunyai tingkat pengaruh sebesar 95,9 persen terhadap belanja langsung/belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado, hal ini tentu sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan belanja pembangunan diambil dari PAD.

Melihat hal ini pemerintah kota Manado tentu harus terus meningkatkan kemampuan PAD nya dan semakin menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang artinya tingkat pembangunan yang dilakukan di Manado akan terus meningkat.

Kata kunci : PAD, Pendapatan Pajak (PP), Retribusi,PAD Lain, Belanja Langsung (BL).

ABSTRACT

Regional autonomy is a true delegation of authority from centralization to decentralization, meaning that the authority of the center has been delegated to the regions as well as managing their own household budget.

Economic independence of a region also assessed on the level of local revenue (PAD) owned compared to transfer funds from the central government. The largest sources of revenue came from taxes, fees and other legitimate PAD. This study used a method of Ordinary Least Square (OLS) to determine how much revenue sources namely income tax, income levy and other legitimate PAD affects development spending / shopping directly Manado.

In testing obtained, the numbers R square of 95.9, which means the level of influence of these three independent variables incorporated in the PAD has a level of influence for 95.9 percent of the direct spending / shopping development undertaken by the city of Manado, it is certainly in line with government regulations which requires the development expenditure is taken from the PAD.

Seeing this Manado city government would have to continue to improve its revenue and further reduce the level of dependence on the transfer of funds from the central government, which means the level of development undertaken in Manado will continue to rise.

Keywords: PAD, Income Tax, Levy, Other Income, Direct Expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan perekonomian suatu daerah sejatinya adalah pengelolaan yang maksimal berbagai sektor perekonomian yang dimiliki. Sektor-sektor perekonomian yang terkelola dengan maksimal dan serasi tentu akan memberi efek agregat terhadap peningkatan perekonomian.

Pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan sebuah daerah yang nantinya akan memberi kemampuan kepada sebuah daerah untuk semakin mandiri dalam sektor pendapatan yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut, melalui peningkatan pembangunan serta ketersediaan dana yang mencukupi dalam tatanan keuangan daerah untuk terus menggenjot perekonomian. Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah, instansi terkait serta investor maupun masyarakat untuk bersama-sama menstimulus perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan.

Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Dewasa ini di berbagai daerah masih belum bisa mengelola dengan maksimal sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran Dana Transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.

Hal ini tentu menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, meskipun tidak sedikit masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini guna menunjang pembangunan di daerah tentu dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat dibarengi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Saragih 2003 : 82).

Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanjanya di setiap periode. Perimbangan keuangan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari sekian banyak hubungan yang dimilikinya, hubungan ini sendiri bersifat (intergovernmental fiscal relation system), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pendelegasian wewenang pemerintah.

Dalam kenyataannya sendiri prosentase kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya masih kecil dan sebagian besar masih berharap pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kecil yakni masih berada di kisaran 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah guna menyokong anggaran belanjanya masih diditopang sebagian besarnya oleh dana transfer pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang yakni sebesar 75% persen dari Total Pendapatan Daerah (TPD).

Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat (Yani, 2002 : 3).

Sulawesi Utara adalah daerah yang berada di ujung utara pulau Sulawesi dan berada di kawasan timur Indonesia merupakan salah satu daerah yang tengah menjadi sorotan baik di Indonesia bahkan dunia. Perputaran ekonomi yang cepat serta banyaknya peluang investasi yang kian terbuka menyebabkan perekonomian ikut terpacu. Letak geografis di bibir pasifik menjadikannya daerah yang berpotensi menjadi pusat perdagangan bukan hanya kawasan Indonesia Timur namun juga pusat perdagangan dunia. Saat ini berbagai sumber perekonomian potensial terus digalakan pemerintah, mulai dari berbagai iven international, pembangunan jalan tol kedua di pulau Sulawesi yang menghubungkan Manado-Bitung serta kawasan ekonomi khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP) Bitung. Hal ini tentu merangsang investor dan pemodal baik dari sektor swasta dan pemerintah, dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di bumi nyiur melambai. Hal ini tentu bertujuan bukan hanya demi keuntungan sesaat namun guna menunjang peningkatan perekonomian serta membuka akses global melalui komunitas masyarakat ASEAN dengan Kota Manado sebagai ibukotanya.

Pasca otonomi daerah Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai pintu masuk perdagangan terus menikmati perkembangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Utara, Manado menempati peringkat teratas. Dengan semakin berkembangnya akses ke Kota Manado tentu membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan membuka lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat luas. Dengan adanya sumber-sumber PAD yang baru maka diharapkan kedepannya akan mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat guna membiayai APBD nya sendiri, apalagi dilihat secara makro kemampuan perekonomian Kota Manado masih amat bergantung pada tingkat pertumbuhan nasional serta besarnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Didasari oleh kesadaran inilah, perhatian besar dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kemampuan daerah dalam membiayai APBDnya sendiri perlu untuk ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat dalam Total Penerimaan Daerah (TPD), yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah. Tentunya dengan memfokuskan perhatian pada sumber-sumber ekonomi yang potensial seperti pariwisata yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir hingga bisa mencapai angka 70 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya yang hanya mampu menyumbang 10 miliar ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak serta retribusi diharapkan dapat menunjang pertumbuhan serta meningkatkan kemandirian daerah. Pendapatan-pendapat ini kemudian di alokasikan kembali ke sektor belanja yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan.

RUMUSAN MASALAH

Tujuan utama dari pelaksanaan Otonomi adalah untuk membagi tanggung antara pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan, agar jalannya pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang lebih terfokus karena pemerintah di daerah tentu lebih mengetahui permasalahan serta kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Selain itu kemampuan sebuah daerah untuk mengelola serta memanfaatkan anggaran

rumah tangganya sendiri sehingga bisa mencapai tahap yang maksimal dan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat di daerah.

Hal ini tentu menarik untuk diteliti untuk melihat seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap sektor pembiayaan pembangunannya.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah : Bagaimana Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi serta Pendapatan Asli Daerah Lain Yang Sah Berpengaruh Terhadap Belanja Pembangunan di Kota Manado ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja pembangunan kota Manado.

Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Manado untuk mengetahui perkembangan perekonomiannya, terlebih dari sektor Pendapatan Asli Daerah serta belanja pembangunannya.

Untuk digunakan pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah – masalah yang berhubungan dengan Pengelolaan fiskal Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, serta obyek pendapatan (Admin,2010) Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah (Bab IV Pasal 16 No 3 UU Nomor 17 Tahun 2003). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu bersumber dari Pendapatan hasil Pajak, hasil Retribusi Daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Augustyas, (2013) mengatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan.

Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang diberikan dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam Negeri atau luar Negeri. Dana Darurat merupakan bantuan dari Pemerintah dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

fasilitas sosial dan fasilitas umum;

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 tentang Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka-angka
Data tentang belanja langsung kota Manado
Data tentang belanja tidak langsung kota Manado
Sejarah singkat kota Manado

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung baik lewat dokumen, lewat orang lain, internet atau melalui organisasi-organisasi yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil data dari APBD Kota Manado tahun 2008 sampai 2014.

Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, tiga komponen dari pendapatan daerah yaitu pajak daerah, dana retribusi dan PAD lain yang sah sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur belanja langsung sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan sub-sektor transportasi.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF >10$ (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi

variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung terhadap peningkatan sub-sektor transportasi yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

$$Y = @ + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

@	= Konstanta
X1	= Pendapatan Pajak
X2	= Pendapatan Retribusi
X3	= PAD Lain yang sah
Y	= Belanja Pembangunan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= koefisien regresi untuk variable x1,x2
e	= Variabel pengganggu

Uji Statistik

Uji statistic dalam penelitian ini meliputi uji-t dan uji-f, dan uji R^2 dimana uji statistic ini untuk melihat apakah variable belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan sub-sektor transportasi

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel

dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila p-value < 5 % (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi klasik,

Untuk memperoleh hasil regresi berganda yang baik maka terlebih dahulu digunakan uji asumsi klasik, untuk menguji variable Pendapatan Pajak (X1) Pendapatan Retribusi (X2) PAD lain yang sah (X3) dan Belanja pembangunan (Y) yang akan diteliti.

Multikolerasi

Tabel 1
Hasil uji Multikolinearitas Model Summary (a) coefficient

Correlations Part	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
,103	,856	1,169
,880	,863	1,159
-,029	,834	1,198

Berdasarkan hasil collinearity statistics dapat dilihat pada output coefficient model, dikatakan terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF > 10. Hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF untuk variable belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar $1.169 < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Menurut Singgih Santoso (2004 :219) untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW test). Model regresi dikatakan tidak terdapat korelasi apabila nilai Durbin Watson berkisar 1,55 sampai 2,46 (untuk $N < 15$)

Tabel 2
Tabel 4.2 Uji Autokorelasi

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	
1	,949	18,681	3	3	,019	2,606

Predictors: (Constant), PAD Lain, Retribusi, Pajak

Model Summary (b)

b. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber data : Pengolahan Data 2015

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 2,606 dan nilai DL 0.1714 , dan DU 3,149 . $DL < DW < DU$ yakni 0.610 DL, 0,931 DW, 2,709 DU. DW berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi didapati hasil sebagai berikut.

Tabel 3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,974 ^a	,949	,898	,05079	,949	18,681

a. Predictors: (Constant), PAD LAIN, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH
Model Summary^b

b. Dependent Variable: BELANJA LANGSUNG

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Exogenus belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama terhadap variabel Dependen Endogenus sub-sektor transportasi dapat dilihat pada Tabel 3 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R²) pada tabel dibawah ini adalah 0,949. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PAD lain yang sah terhadap variabel dependen endogenus Belanja langsung secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,949 \times 100\%$$

$$KD = 94,9\%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen Pajak daerah, retribusi, dan PAD lain yang sah terhadap Variabel Dependen Belanja Langsung secara gabungan adalah 94,9%. Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,949$$

$$e = 0,051 \times 100\%$$

$$e = 5,1\%$$

Yang berarti 5,1% besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Lain yang sah terhadap variabel dependen Belanja Langsung adalah sebesar 94,9%, sedangkan pengaruh sebesar 5,1% disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti

Tabel 4 Uji Beta
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,834	1,501		1,222	,309
	PAJAK	,048	,061	,111	,788	,488
	RETRIBUSI	,909	,134	,948	6,765	,007
	PAD LAIN	-,028	,125	-,032	-,222	,839

Pengaruh Variabel Independen Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenus Pajak Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Langsung. Dapat dilihat pada tabel 4 Coefficients(a). Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 7 - (2+1) = 4$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar ,788 (untuk uji dua arah). Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Pajak terhadap Variabel Dependen Belanja Langsung. Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut : Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $7 - (2+1) = 4$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 3,070 (untuk uji dua arah)

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar ,788 < t tabel sebesar 2,132. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linear antara variable independen belanja langsung terhadap variable independen sub-sektor transportasi. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus belanja langsung terhadap Variabel Dependen sub-sektor transportasi diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,111 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig ,140 > 0,05.

Pengaruh Variabel Independen Retribusi terhadap Belanja Langsung

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenus Retribusi Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Langsung. Dapat dilihat pada tabel 4 Coefficients(a). Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 7 - (2+1) = 4$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 6,765 (untuk uji dua arah). Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Retribusi terhadap Variabel Dependen belanja langsung ialah ,909. Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut : Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $7 - (2+1) = 4$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 3,070 (untuk uji dua arah)

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 6,765 < t tabel sebesar 2,132. Dengan demikian keputusannya ialah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tak ada pengaruh linear antara variable independen retribusi terhadap variable independen belanja langsung. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus Retribusi terhadap Variabel Dependen Belanja Langsung diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,948 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig ,007 > 0,05.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous PAD Lain yang sah Terhadap Variabel Dependen Endogenus belanja langsung.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen PAD lain terhadap Variabel Dependen Endogenus belanja langsung. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 7 - (2+1) = 4$. Dari

ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,132 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi ialah -,028. Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut : Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $7 - (2+1) = 4$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar -,222 (untuk uji dua arah) Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 8.313 > t table sebesar 2,132. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi. Maka Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah -,320 Signifikan karena nilai signifikansi/ probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,005.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang di lakukan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD lain terhadap belanja langsung jika dilihat dari uji multikorelasi tidak terjadi multikorelasi karena nilai VIF dari ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10,00. Pengaruh antara variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lain yang sah adalah sebesar Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan PAD Lain terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Langsung secara gabungan adalah 94,9%. Dengan pengaruh di luar model adalah sebesar 5,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh ketiga variable independend yang tergabung dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tingkat pengaruh yang sangat signifikan terhadap variable dependent yang adalah Belanja Langsung atau belanja investasi yang dilakukan pemerintah

Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbagi dalam pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan Pendapatan lain yang sah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan atau investasi yang berbentuk belanja langsung, yakni untuk belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Bahkan tingkat signifikansinya mencapai angka 94 %, yang artinya belanja pembangunan atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado amat dipengaruhi oleh sumber-sumber PADnya. Hal ini tentu sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa belanja pembangunan harus berasal dari PAD.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh PAD terhadap belanja langsung atau belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah penulis coba memberikan saran : Mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah tertata dengan baik di pemerintah kota Manado, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum dikelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan.

Membuka sector-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan taraf kemandiriannya dan tidak terlalu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer, dan dengan adanya sumber-sumber ekonomi baru ini diharapkan belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado akan bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena dengan adanya sumber perekonomian yang baru maka tentunya akan menyerap tenaga kerja yang belum bisa terserap sebelumnya karena kurangnya kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999** Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo, 2011.** Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kevin D. Hoover, Steven M Sheffrin,** the American Economics review, vol 82, no.1 (Mar. 1992)
- Mardiasmo, 2009,** Perpajakan, Yogyakarta : Andi. Edisi Revisi.
- Marihot Pahala Sihan, 2010,** Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mangkoesebroto. 1993.** Ekonomi Publik (Edisi 3). Yogyakarta : BPFE UGM
- Priyanto, Andri 2009.** Analisis Ketimpangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten”, tahun 2001-2008 : Jurnal
- Saragih, Junawi, Hartasi. 2010.** Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komperatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat) Tahun 1975-2007 : Jurnal
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994.** Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Edisi pertama, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005** Tentang Dana Perimbangan
- Kuncoro, Mudrajat, 2003,** Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?, Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat, 2004,** Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2004,** Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Panggabean, Edison, Hendri H, 2009,** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan
- Saragih, Juli Panglima. 2003.** Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002** Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005** Tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010** Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005** Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- <http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/01/pengertian-pendapatan-daerah.html>
- <http://www.keuangandaerah.net/2010/02/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwj0cSo8MvIAhWF15QKHTvGA6g&url=http%3A%2F%2Fwww.kpu.go.id%2Fdmdocuments%2FUU_32_2004_Pemerintahan%2520Daerah.pdf&usg=AFQjCNFOZXX0PXFAsCFOcIp0_bWjCJiJeQ&bvm=bv.105454873,d.dGo

Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara

Badan Pusat Statistik Kota Manado

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado